

Komunikasi Pembangunan Blok Cepu
Oleh:Faris,S.Sos.,M.Med.Kom
farisnawawi@gmail.com

Ditengah-tengah tarik ulurnya blok migas Cepu, Pemerintah dalam hal ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta restrukturisasi ditubuh PT. Pertamina. Bunyi pasal 33 UUD’ 45 bahwa hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara menjadi ironi didunia pertambangan nasional. Terbukti dari data BP Migas, pengelolaan sektor migas masih banyak dikuasai asing. Dalam kasus pengelolaan block Cepu, ketidak berdayaan sebagai suatu bangsa kembali terlihat. Langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa meningkatkan bargaining position dalam proses operasional nanti berbuntut pada molornya jadwal eksplorasi yang idealnya bisa dilakukan pada 2007 mendatang.

Status PT. Pertamina sebagai suatu entitas bisnis yang independen juga membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi lenih jauh. Sebab, mekanisme pengambilan keputusan tetap diupayakan agar diambil oleh *business to business* tersebut. Persoalan tarik ulurnya kedua operator tersebut tidak perlu bila bangsa ini memiliki visi kedepan. Kepemilikan pengelolaan Cepu oleh Pertamina telah dimiliki sejak 1987 , hal ini berdasarkan pada SK menteri Pertambangan dan Energi No 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) mencakup kawasan seluas 973 km persegi. Kawasan itu semula dikelola PPT Mgas, kemudian diserahkan ke Pertamina UEP III Lapangan Cepu

Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan,Modernisasi,Masyarakat Tradisional
di dalamnya adalah milik negara

A. Latar Penulisan	menjadi ironi didunia
Ditengah-tengah tarik	pertambangan nasional. Terbukti
ulurnya blok migas Cepu,	dari data BP Migas, pengelolaan
Pemerintah dalam hal ini Presiden	sektor migas masih banyak
Susilo Bambang Yudhoyono	dikuasai asing. Dalam kasus
meminta restrukturisasi ditubuh	pengelolaan block Cepu, ketidak
PT. Pertamina. Bunyi pasal 33	berdayaan sebagai suatu bangsa
UUD’ 45 bahwa hasil bumi dan	kembali terlihat. Langkah-langkah
kekayaan alam yang terkandung	yang dilakukan untuk bisa

meningkatkan bargaining position dalam proses operasional nanti berbuntut pada molornya jadwal eksplorasi yang idealnya bisa dilakukan pada 2007 mendatang.

Status PT. Pertamina sebagai suatu entitas bisnis yang independen juga membuat pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi lenih jauh. Sebab, mekanisme pengambilan keputusan tetap diupayakan agar diambil oleh *business to business* tersebut. Persoalan tarik ulurnya kedua operator tersebut tidak perlu bila bangsa ini memiliki visi kedepan. Kepemilikan pengelolaan Cepu oleh Pertamina telah dimiliki sejak 1987, hal ini berdasarkan pada SK menteri Pertambangan dan Energi No

0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) mencakup kawasan seluas 973 km persegi. Kawasan itu semula dikelola PPT Mgas, kemudian diserahkan ke Pertamina UEP III Lapangan Cepu

BUMN membahas hal tersebut dan langsung melaksanakan berbagai macam survei dan penyiapan lahan. Namun, setelah siap melaksanakan pengeboran, pada April 1990 justru pengelolaan block Cepu dialihkan ke PT Humpuss Patra Gas yang menandatangani technical assistance contrac (TAC) untuk 20 tahun (1990-2010). Block migas yang bisa memenuhi hajat hidup orang banyak tersebut tidak

juga menghasilkan hingga kemudian pergantian kondisi politik asional terjadi 1998. akhirnya, pengalihan kepemilikan terjadi dari Humpuss ke Ampolex, perusahaan migas asal Australia. Setelah itu, Ampolex, diakuisisi Exxon yang merger dengan Mobil Oil pada 1999. keputusan akuisisi tersebut juga diketahui pemerintah Indonesia, termasuk Kwik Kian Gie, Meneg PPN dan kepala Bapennas saat itu. Belakangan Kwik termasuk diatnra deretan orang-orang yang menolak pengelolaan blok Cepu jatuh ke tangan asing. Meski demikian, upaya meningkatkan bargaining position yang berakibat pada molornya proses produksi juga bukan tanpa kerugian. Blok Cepu yang

diperkirakan menghasilkan 170.000 barel minyak perhari . tidak beroperasinya blok Cepu setiap hari menghiolangkan pendapatan bersih Indonesia dari produksi itu dapat mencapai USD 9,2 juta per hari atau sekitar Rp 85 miliar, menurut Meneg BUMN Sugiharto (jawa pos 4 maret 2006)

B. SIGNIFIKASI

Masalah pengelolaan kekayaan alam terutama masalah migas di Indonersia selalu menuai suatu permasalahan-permasalahan baru saja, terlihat dari alotnya negosiasi-negosiasi yang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama pada penentuan tentang siapa yang pantas dalam pengelolaan

migas tersebut serta masalah bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Dimana dalam kasusus pengelolaan migas di Cepu ini juga melibatkan adanya intervensi dari pihak asing yang berkepentingan dalam proyek ini, terbukti dengan berkunjungnya menteri luarnegri Amerika Serikat Yitu Condolisa Rise dan terlihat bahwa pemerintah berpihak pada perussahaan yang berasal dari negri Paman Sam itu, yaitu Exxon. Bila pemerintah tidak benar-benar bersikap arif dan bijak dalam mengambil keputusan ini maka negara akan benar-benar dirugikan seperti apa yang terjadi pada pengelolaan di Papua. Pokok persoalan dari tarik ulurnya antara Pertamina dan Exxon ialah

menyangkut hak pengelolaan ladang migas tersebut dari sisi *operatorship*, kedua operator memiliki argumentasi yang sama-sama menyakinkan

C. Perspektif Teori

Teori Modernisasi

Modernisasi, teori yang lahir tahun 50-an yang merupakan respon kaum intelektual terhadap Perang Dunia, dianggap jalan paling optimis, menuju perubahan. Huntington (1976) percaya bahwa modernisasi bersifat revolusioner (perubahan cepat global, akan mempengaruhi semua manusia). Bertahap (melalui langkah-langkah), homogenisasi (convergency dan progresif). Pemikiran modernisasi bisa dijumpai dalam buku McClelland *The Achieving Society*

(1916). Menurut Mc Clelland, penjelasan mengapa rakyat dunia ketiga berada dalam keadaan terbelakang adalah karena rendahnya kebutuhan berprestasi tersebut. Teori modernisasi didominasi oleh kaum sosiolog dan psikolog, kalangan ekonom merumuskan teori-teori mereka dengan menekankan pada kemampuan produktif sumber daya manusia sebagai modal utama. Meskipun banyak teori yang lahir, umumnya menyakini satu hal yang sama yakni bahwa faktor manusia (bukan struktur dan sistem) yang menjadi fokus utama perhatian mereka. Model pertama dengan menggunakan metafora pertumbuhan yakni tumbuh sebagai organisme, teori modernisasi melihat

pembangunan sebagai proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Pemikiran ini dapat ditemukan dalam skema lima tahap (*the five – stage scheme*) pembangunan dari teori pertumbuhan yang sangat terkenal yang dikembangkan oleh W.W Rostow (1960). Asumsinya bahwa semua masyarakat, termasuk masyarakat barat pernah mengalami tradisional dan akhirnya menjadi modern. Dalam hal ini, sikap manusia tradisional dianggap sebagai masalah.

Konsep pembangunana dan modernisasi yang kemudian serta merta dianut oleh berjuta-juta dunia ketiga, pada dasarnya merupakan refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial. Pembangunan diidentifikasi

dengan gerak langkah demi langkah menuju modernitas yang lebih tinggi (higher modernity). Yang dimaksud modernitas disini merefleksi pada bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dicapai oleh negara-negara industri.

⊙ W.W ROESTOW

Dalam bukunya *The Stage of Economic Growth a non communist manifesta*, dia menguraikan teorinya tentang proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Roestow membagi proses pembangunan dalam sebuah masyarakat. Roestow membagi proses pembangunan ini menjadi 5 tahap berikut:

a. Masyarakat tradisional

b. Prakondisi untuk lepas landas, cirinya:

- Tidak ada pertumbuhan ekonomi
- Ada peran media
- Ada komunikasi politik

c. Lepas landas, dicirikan:

- Penguasa teknologi
- Pertumbuhan ekonomi
- Pesan media yang paling besar
- Keterbukaan komunikasi pembangunan

d. Bergerak ke dewasaan

- Adanya peningkatan taraf pendidikan
- Adanya tingkat kepedulian atas lingkungan sekitarnya

e. Era konsumsi yang tinggi

- Adanya tingkat daya beli masyarakat yang tinggi

D. ANALISA

Dalam teori modernisasi, merupakan proses evolusi perjalanan dari tradisional ke modern. Teori ini dapat digunakan untuk melihat atau

memecahkan adanya masalah tentang keterlambatan pemerintah dalam menangani kasus demam berdarah.

Pemerintah merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menangani polemik Block Cepu. Tanggung jawab pemerintah tidak hanya menangani kasus Block Cepu. Tetapi masalah Block Cepu tidak layak untuk diabaikan karena berdampak pada kredibilitas pemerintah di mata dunia Internasional serta pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pada kasus Block Cepu ini Pokok persoalan dari tarik ulurnya antara Pertamina dan Exxon ialah menyangkut hak pengelolaan ladang migas tersebut dari sisi *operatorship*, kedua operator

memiliki argumentasi yang sama-sama menyakinkan

Pemerintah mengemukakan kesiapannya disertai argumentasi biaya pengeboran akan jatuh lebih mahal bila ditangan Exxon. Sementara itu, Exxon menilai mahal nya pembiayaan di sebabkan standart pengelolaan bisnis migas yang harus memenuhi level tertentu sehingga menciptakan stabilitas pasokan dan amannya proyek. Tudingan tersebut membuat pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap proyek yang diperkirakan membutuhkan investasi hingga Rp 20-25 triliun tersebut.

Dalam teori Roestow membagi ada beberapa tahap proses pembangunan antara lain:

a. Masyarakat Tradisional

Masyarakat pada umumnya, sering menganggap masalah Block Cepu adalah masalah yang ringan, masyarakat baru akan bertindak, jika sudah merasakan dampak dari ketidak bijakan dan kearifan dari proyek tersebut, hal biasa yang dilakukan masyarakat karena ketidak mengertian dan kurang peduli atas masalah yang menimpa bangsanya.

Masyarakat tradisional terlalu simpel menanggapinya, untuk segera menuntut pemerintah dalam penyelesaian polemik tersebut secara kritis, hanya dibiarkan yang penting ketika proyek itu berjalan mereka diikut sertakan sebagai

pekerja untuk menambah pendapatan rumah tangganya tanpa memikirkan masalah yang menimpa negara ini

b. Pra kondisi untuk lepas landas, cirinya:

- Tidak ada pertumbuhan ekonomi

Dimasa ini laju pertumbuhan ekonomi lambat dikarenakan kurangnya para investor untuk membuka lapangan-lapangan usaha dan ditambah dengan adanya ketidak arifan dan ketidak bijakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan-keputusan yang berkenaan dengan hajat hidup orang

banyak, yang pada akhirnya menghambat pula proses produksi yang berpengaruh pada lambatnya pertumbuhan ekonomi

▪ Ada peran media

Peran media disini sangat diperlukan, karena media merupakan suatu media yang sangat efektif untuk memberikan informasi tentang masalah yang terjadi di blok Cepu, media TV/Radio, pemerintah dapat menggunakan media ini sebagai alat untuk mengajak masyarakat untuk memberikan masukan bagaimana penanganannya yang semestinya dilakukan dengan tidak merugikan kepentingan

berbagai pihak yang seharusnya mendapatkan haknya

Media surat kabar juga sangat penting, untuk selalu mengingatkan masyarakat. Dengan adanya media, masyarakat akan tahu dan lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam polemik antara Pertamina dengan Exxon serta pemerintah sebagai penhambill kebijakan(penguasa)

▪ Ada komunikasi politik

Adanya tindakan langsung pemerintah sangat diperlukan, pemerintah tidak hanya diam dengan masalah ini. Pemerintah bisa langsung mengadakan inspeksi mendadak di tubuh Pertamina atas tuduhan atau dugaan atas mahalnnya pembiayaan

pengelolaan yang disebabkan standart pengelolaan bisnis migas yang harus memenuhi level tertentu.

Seperti yang sekarang dilakukan pemerintah untuk segera merestrukturisasi ditubuh Pertamina.

c. Lepas landas

- Penguasaan teknologi
Pada alat yang digunakan untuk pengelolaan sudah cukup memadai, ditinjau dari jumlah pelaksanaanya yang kurang efektif dan mapu dalam penguasannya, seperti masi seringnya mendatangkan teknisi-teknisi ahli dari asing dan tidak mendidik anak

bangsa untuk menguasai itu secara mereata

▪ Pertumbuhan ekonomi

Dimasa-masa krisis ini seharusnya pemerintah memberikan pelayanan pengobatan yang gratis atau potongan separuh harga dari biaya pengobatan pada penduduk yang tidak mampu, sebab mereka merupakan aset bangsa yang dapat mendorong pemulihan ekonomi dan jika hal ini terus berlanjut, korban tambah banyak maka dapat juga menghambat laju perekonomian karna banyaknya pekerja yang

jatuh sakit sehingga proses produksi jadi tidak efektif

- Pesan media yang paling besar

Media sebagai penyampai pesan harus memberikan pengetahuan yang jelas atas kronologis yang terjadi dan apa masalah yang sebenarnya dipertaruhkan dan meberikan masukan atas apa yang semestinya dilakukan oleh pemerintah karna insan-insan perslah yang dapat mejakau dengan cepat pada lapisan level masyarakat bawah dan keatasan

- Keterbukaan komunikasi pembangunan

Dalam penanggulangan masalah block Cepu ini pemerintah harus bersikap terbuka dalam pengalokasian dana transparan seperti berapa jumlah dana yang dikeluarkan termasuk penyediaan alat untuk migas tersebut, langkah-langkah apa saja yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan masalah blok Cepu itu, rakyat harus tahu dan jelas,

- d. Bergerak ke dewasaan

- Adanya peningkatan taraf pendidikan

Banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan, dapat menimbulkan taraf kesadaran masyarakat untuk selalu waspada pada apa yang terjadi di lingkungannya sebab masyarakat akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi masalah tersebut hal ini disebabkan pengetahuan yang diperolehnya, namun hal ini tidak terjadi pada masyarakat indonesia, dapat dilihat dengan masih banyaknya warga yang cuek atas masalah bangsa yang terjadi

- Adanya tingkat kepedulian atas lingkungan sekitarnya Dengan adanya tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat idealnya sudah memiliki tingkat kepedulian yang cukup baik untuk dapat tetap waspada terhadap apa yang terjadi disekitarnya seperti mengadakan gotong royong semua komponen bangsa untuk membangun dan menjaga daerahnya sendiri-sendiri, hal ini terjadi di Indonesia malah tidak merata, hal ini disebabkan adanya ketidak mengertian dan

kefahaman atas masalah yang dihadapi bangsa ini

e. Era konsumsi yang tinggi

- Adanya tingkat daya beli masyarakat yang tinggi

Pada tingkat ini seharusnya masyarakat indonesia sudah mampu mengatasi ataupun mengeolah sendiri kekayaan alamnya sendiri tanpa mendatangkan pihak asing yang hanya menambah rumit masalah yang terjadi dan bukan keuntungan yang didapat malah kerugian yang tambah besar.

E. KESIMPULAN

Untuk menanggulangi blok cepu ini, maka pemerintah sebaiknya dapat bertidak dengan cepat dan tepat agar tidak semakin menambah kerugian pemerintah disektor migas setelah banyaknya korupsi yang dilakukan pejabat-pejabat yang terkait.

Jika dalam waktu dekat ini masih belum ada penyelesaiannya maka pemerintah harus segera memberikan keputusan tentang siapa yang berhak mengelola migas di Cepu tersebut, yang tentunya tidak merugikan bagi penduduk sekitar pada khususnya dengan mengikut sertakan mereka sebagai pekerja di pertambangan tersebut untuk peningkatan taraf pendapatan serta pemberian harga

yang pantas bagi warga yang
lahannya terkena proyek tersebut.
Dan tentunya keputusan apan
yang diambil pemerintah itu agar
selalu berpihak pda kepentingan
bangsanya sendiri jangan takut
akan intervensi pihak asing yang
belum tentu memberikan
keuntungan yang memuaskan

DAFTAR PUSTAKA

-FAKIH MASOUR,1999, *Analisis
gender dan tranformasi
sosial*,Rosda
karya,Bandung
-Jawa pos,4 Maret 2006
-<http://biomed.ee.itb.ac.id>)
-www.suarametro.com/berita/1797
-
[www.beritaiptek.com/message/arti
kel](http://www.beritaiptek.com/message/artikel)